

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rancangan Renja BAPPEDA Provinsi Maluku Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Renja OPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD setiap tahun berjalan.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Bappeda Provinsi Maluku mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Maluku mengingat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- Persiapan Penyusunan
- Penyusunan Rancangan Awal
- Penyusunan Rancangan
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- Perumusan Rancangan Akhir, dan
- Penetapan

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tetang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara.
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 - 2025.
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033.
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ Maksud

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024 dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Bappeda

Provinsi Maluku untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

➤ **Tujuan**

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Pelaksanaan Pelayanan selama I (satu) tahun
2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian program dan kegiatan
3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : latar belakang penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

Memuat pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA, reviu terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini merupakan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rancangan Renja BAPPEDA, serta program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BAPPEDA Provinsi Maluku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Tahun 2023, Bappeda Provinsi Maluku melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perencanaan di daerah ditunjang oleh program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung

pencapaian tujuan pembangunan daerah dibidang perencanaan.
Jumlah program yang terdapat pada Renja Bappeda tahun 2023
adalah sebanyak 4 program, 17 kegiatan dan 63 sub kegiatan.

**Tabel 2.1: Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Bappeda s/d Tahun 2022
Provinsi Maluku**

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|--|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7 / 6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) | 11 = (10 / 4) |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| Perencanaan | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja dan keuangan perangkat daerah</i> | 21.915.763.025 | | | | | 14.230.085.623 | | |
| - | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 815.782.012 | 106.544.104 | | 712.319.156 | | 669.048.649 | 1.487.911.909 | 1,82 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|------|
| - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 | 199.000.000 | 0 | 110.898.253 | 50.637.208 | 161.535.461,00 | 55.637.208 | 106.274.416 | 0,53 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya dokumen RKA SKPD | 59.526.569 | 18.194.104 | 53.992.353 | 51.157.094 | 105.149.447,00 | 56.691.971 | 126.043.169 | 2,12 |
| - | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD | 59.526.569 | 0 | 53.992.353 | 51.785.834 | 105.778.187,00 | 56.691.971 | 108.477.805 | 1,82 |
| - | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya dokumen DPA SKPD | 26.028.702 | 0 | 23.608.800 | 22.290.044 | 45.898.844,00 | 27.789.240 | 50.079.284 | 1,92 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD | 26.028.702 | 0 | 23.608.800 | 23.591.002 | 47.199.802,00 | 27.789.240 | 51.380.242 | 1,97 |
| - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 202.579.203 | 88.350.000 | 183.745.309 | 272.080.073 | 455.825.382,00 | 192.932.574 | 553.362.647 | 2,73 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen evaluasi triwulan Perangkat Daerah | 243.092.267 | 0 | 220.491.852 | 240.777.901 | 461.269.753,00 | 251.516.445 | 492.294.346 | 2,03 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah | 10.089.829.861 | - | | 8.372.519.911 | 8.372.519.911,00 | 9.193.726.120 | 106.274.416 | 1,82 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------|
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN | 9.601.183.572 | 0 | 7.934.862.456 | 7.895.049.273 | 15.829.911.729,0 0 | 8.728.348.702 | 16.623.397.975 | 1,73 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD | 332.368.029 | 0 | 301.467.600 | 252.762.800 | 554.230.400,00 | 316.540.980 | 569.303.780 | 1,71 |
| - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD | 98.397.155 | 0 | 89.249.120 | 138.608.550 | 227.857.670,00 | 93.711.576 | 232.320.126 | 2,36 |
| - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran | Tersedianya laporan keuangan SKPD secara bulanan, triwulanan dan semesteran | 57.881.105 | 0 | 52.499.869 | 86.099.288 | 138.599.157,00 | 55.124.862 | 141.224.150 | 2,44 |
| - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya data administrasi kepegawaian | 288.477.985 | 53.400.000 | | 259.227.678 | 259.227.678,00 | 261.658.037 | 574.285.715 | 1,99 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Bimtek bagi ASN Bappeda | 288.477.985 | 53.400.000 | 261.658.037 | 259.227.678 | 520.885.715,00 | 274.740.938 | 587.368.616 | 2,04 |
| - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya pengadministrasian umum perangkat daerah | 2.680.000.000 | 449.509.060 | | 413.968.637 | 413.968.637,00 | 568.362.003 | 1.431.839.700 | 0,53 |
| - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor | 855.000.000 | 162.000.000 | 26.990.040 | 25.704.800 | 52.694.840,00 | 28.339.542 | 216.044.342 | 0,25 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya alat tulis kantor dan APD (handsanitaizer, Masker dan disinfekta) | 760.000.000 | 144.809.060 | 398.856.771 | 251.330.642 | 650.187.413,00 | 418.799.609 | 814.939.311 | 1,07 |
| - | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 425.000.000 | 67.700.000 | 57.723.750 | 80.723.195 | 138.446.945,00 | 60.609.938 | 209.033.133 | 0,49 |
| - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan | 150.000.000 | 0 | 31.500.000 | 30.000.000 | 61.500.000,00 | 33.075.000 | 63.075.000 | 0,42 |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Tersedianya makanan dan minuman tamu | 490.000.000 | 75.000.000 | 26.226.585 | 26.210.000 | 52.436.585,00 | 27.537.914 | 128.747.914 | 0,26 |
| - | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya kelengkapan penunjang kerja kantor | 5.984.144.971 | 46.390.000 | | 1.210.039.500 | 1.210.039.500,00 | 1.602.390.564 | 2.858.820.064 | 0,48 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Dinas bagi ASN | 2.299.842.000 | 0 | 400.000.000 | 479.571.500 | 879.571.500,00 | 550.000.000 | 1.029.571.500 | 0,45 |
| - | Pengadaan Mebel | Tersedianya mebel kantor | 1.539.151.128 | 0 | 503.685.641 | 159.008.000 | 662.693.641,00 | 503.685.641 | 662.693.641 | 0,43 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan kantor | 2.145.151.843 | 46.390.000 | 522.585.641 | 571.460.000 | 1.094.045.641,00 | 548.704.923 | 1.166.554.923 | 0,54 |
| - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa dan fasilitas penunjang kerja perkantoran' | 738.530.040 | 119.688.200 | | 710.149.572 | 710.149.572,00 | 738.530.040 | 1.568.367.812 | 2,12 |
| - | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya layanan penerangan dan internet kantor | 211.845.375 | 7.200.000 | 192.150.000 | 187.289.988 | 379.439.988,00 | 211.845.375 | 406.335.363 | 1,92 |
| - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa cleaning kantor dan sopir | 526.684.665 | 112.488.200 | 477.718.517 | 522.859.584 | 1.000.578.101,00 | 526.684.665 | 1.162.032.449 | 2,21 |
| - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya barang-barang milik daerah yang terawat dengan baik | 1.318.998.156,00 | 113.732.000 | | 907.620.300 | 907.620.300,00 | 1.196.370.210 | 2.217.722.510 | 1,68 |
| - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | tersedianya jasa pemeliharaan, bahan bakar,rehabilitasi dan perijinan kendaraan dinas operasional | 1.120.158.698 | 54.232.000 | 1.016.016.960 | 743.555.300 | 1.759.572.260,00 | 1.016.016.960 | 1.813.804.260 | 1,62 |
| - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 198.839.458 | 59.500.000 | 180.353.250 | 164.065.000 | 344.418.250,00 | 180.353.250 | 403.918.250 | 2,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|---|----------------------|----------------|------|
| - | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 8.975.741.118 | | | | | - | 7.234.232.306 | 7.234.232.306 | 0,81 |
| | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | 6.058.566.390 | 919.710.000 | | 4.332.515.921 | 4.332.515.921,00 | | 4.817.637.239 | 10.069.863.160 | 1,66 |
| - | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan daerah | Tersedianya dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah | 1.302.052.500 | 274.230.560 | 1.181.000.000 | 1.199.803.473 | 2.380.803.473,00 | | 1.240.005.000 | 2.714.039.033 | 2,08 |
| | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan yang Terpadu antar Pusat dan daerah | 518.017.055 | 58.229.440 | 469.856.739 | 252.533.087 | 722.389.826,00 | | 493.349.576 | 804.112.103 | 1,55 |
| | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan yang Terpadu antar Pusat dan daerah | 289.355.106 | 0 | 262.453.611 | 186.603.146 | 449.056.757,00 | | 275.576.292 | 462.179.438 | 1,60 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|------|
| | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan yang Terpadu antar Pusat dan daerah | 289.372.962 | 0 | 262.459.807 | 231.409.014 | 493.868.821,00 | 275.593.298 | 507.002.312 | 1,75 |
| - | Pelaksanaan Musrenbang Provinnsi | Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan yang Terpadu antar Pusat dan daerah | 1.447.018.727 | 587.250.000 | 1.312.488.641 | 767.103.087 | 2.079.591.728,00 | 1.378.113.073 | 2.732.466.160 | 1,89 |
| - | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang terpadu antar pusat dan daerah | 2.212.750.000 | 0 | 1.100.000.000 | 1.695.064.114 | 2.795.064.114,00 | 1.155.000.000 | 2.850.064.114 | 1,29 |
| - | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | 654.049.772 | 0 | | 825.919.534 | 825.919.534,00 | 593.242.423 | 1.419.161.957 | 2,17 |
| - | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang terpadu | 654.049.772 | 0 | 593.242.423 | 825.919.534 | 1.419.161.957,00 | 622.904.544 | 1.448.824.078 | 2,22 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| | | antar pusat dan daerah | | | | | | | | |
| - | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembangunan serta evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah | 2.263.124.996 | 350.250.000 | | 1.272.749.962 | 1.272.749.962,00 | 2.155.367.139 | 3.778.367.101 | 1,67 |
| - | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | tersedianya Laporan Kelitbangan dan Kerjasama daerah | 269.126.437 | 0 | 244.105.612 | | 244.105.612,00 | 256.320.892 | 256.320.892 | 0,95 |
| - | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang terpadu antar pusat dan daerah | 1.907.177.299 | 350.250.000 | 1.729.866.031 | 1.194.004.482 | 2.923.870.513,00 | 1.816.359.332 | 3.360.613.814 | 1,76 |
| - | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang terpadu antar pusat dan daerah | 86.821.260 | 0 | 78.749.442 | 78.745.480 | 157.494.922,00 | 82.686.915 | 161.432.395 | 1,86 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------|
| - | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 9.806.477.216 | 1.847.863.100 | | 9.418.013.623 | 9.418.013.623,00 | 8.876.623.325 | 20.142.500.048 | 2,05 |
| - | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 3.599.028.492 | 627.300.000 | | 3.682.010.705 | 3.682.010.705,00 | 3.264.424.936 | 7.573.735.641 | 2,10 |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah | 115.726.289 | 174.100.000 | 104.999.809 | 104.992.800 | 209.992.609,00 | 110.249.799 | 389.342.599 | 3,36 |
| - | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya koordinasi Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan | 807.435.941 | 0 | 732.368.200 | 832.316.654 | 1.564.684.854,00 | 768.986.610 | 1.601.303.264 | 1,98 |
| - | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah | 269.143.547 | 340.200.000 | 244.121.131 | 114.701.707 | 358.822.838,00 | 256.327.187 | 711.228.894 | 2,64 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| | Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | |
| - | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya koordinasi Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia | 2.406.686.715 | 113.000.000 | 2.182.935.796 | 2.629.999.544 | 4.812.935.340,00 | 2.292.082.585 | 5.035.082.129 | 2,09 |
| - | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | 3.310.522.717 | 593.465.280 | | 3.110.183.928 | 3.110.183.928,00 | 2.984.601.104 | 6.688.250.312 | 2,02 |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Asumsi Makro Ekonomi) | 115.762.404 | 168.450.000 | | | - | | 168.450.000 | 1,46 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 596.171.212 | 425.015.280 | 645.744.776 | 645.744.118 | 1.291.488.894,00 | 678.032.015 | 1.748.791.413 | 2,93 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 1.177.622.335 | 0 | 1.049.997.583 | 1.175.582.856 | 2.225.580.439,00 | 1.152.497.462 | 2.328.080.318 | 1,98 |
| - | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 1.420.966.766 | 0 | 1.288.858.745 | 1.288.856.954 | 2.577.715.699,00 | 1.353.301.682 | 2.642.158.636 | 1,86 |
| - | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | 2.896.926.007 | 627.097.820 | | 2.625.818.990 | 2.625.818.990,00 | 2.627.597.285 | 5.880.514.095 | 2,03 |
| - | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | 306.765.656 | 627.097.820 | 278.245.493 | 198.532.604 | 476.778.097,00 | 250.000.000 | 1.075.630.424 | 3,51 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------|
| - | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 3 Dokumen Larap, 1 Dokumen Integrasi FMSRB ke Pola SDA, Laporan Hasil Koordinasi AWP dan OWP, Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 2.014.251.898 | 0 | 1.826.985.848 | 1.826.985.347 | 3.653.971.195,00 | 1.359.257.593 | 3.186.242.940 | 1,58 |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | 115.760.273 | 0 | 104.997.980 | 104.996.885,00 | 209.994.865,00 | 110.247.879 | 215.244.764 | 1,86 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Tersedianya dokumen perencanaan bidang kawilayahaan | 460.148.180 | 0 | 417.367.964 | 495.304.154,00 | 912.672.118,00 | 500.000.000 | 995.304.154 | 2,16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | - | - | #DIV/0! | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Terlaksananya penelitian dan pengembangan lintas sektor di Provinsi Maluku | 13.440.763.158 | | | | | - | 8.260.216.017 | 8.260.216.017 | 0,61 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | 2.811.507.741 | 150.300.000 | | 653.130.033,00 | 653.130.033,00 | 1.393.873.956 | 2.197.303.989 | 0,78 | |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Terlaksananya evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum | 636.692.664 | 150.300.000 | 577.499.015 | 53.130.229 | 630.629.244,00 | 606.373.956 | 809.804.185 | 1,27 | |
| - Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang aparatur dan Reformasi Birokrasi | | 826.875.000 | 0 | 750.000.000 | 599.999.804 | 1.349.999.804,00 | 787.500.000 | 1.387.499.804 | 1,68 | |
| - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | 3.429.375.000 | 0 | | 1.534.083.815 | 1.534.083.815,00 | 1.750.000.000 | 3.284.083.815 | 0,96 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | | 771.750.000 | 0 | 700.000.000 | 599.999.645 | 1.299.999.645,00 | 735.000.000 | 1.334.999.645 | 1,73 |
| - | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Terlaksananya penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Maluku | 882.000.000 | 0 | | 782.490.239 | 782.490.239,00 | 840.000.000 | 1.622.490.239 | 1,84 |
| - | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Teredianya data dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) | 275.625.000 | 0 | 250.000.000 | 151.593.931 | 401.593.931,00 | 262.500.000 | 414.093.931 | 1,50 |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | 5.556.750.000 | 0 | | 3.240.608.929,00 | 3.240.608.929,00 | 2.520.000.000 | 5.760.608.929 | 1,04 |
| | Penelitian dan Pengembangan pertanian, Perkebunan dan Pangan | | 771.750.000 | 0 | 700.000.000 | 782.497.260 | 1.482.497.260,00 | 735.000.000 | 1.517.497.260 | 1,97 |
| | Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan | Tersedianya dokumen kajian Efektifitas Rantai Pasok Perikanan | 1.785.000.000 | 0 | 1.700.000.000 | 2.458.111.669 | 4.158.111.669,00 | 1.785.000.000 | 4.243.111.669 | 2,38 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | 1.643.130.417 | 164.300.000 | | 1.136.087.085,00 | 1.136.087.085,00 | 1.263.610.356 | 2.563.997.441 | 1,56 |
| | Penelitian Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Tersedianya dokumen kajian/penelitian pembangunan perencanaaan bidang teknologi dan inovasi | 727.650.000 | 164.300.000 | 660.000.000 | 532.481.522,00 | 1.192.481.522,00 | 693.000.000 | 1.389.781.522 | 1,91 |
| | Diseminasi Jenis dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif | Terlaksananya lomba inovasi daerah dan tersedianya data informasi inovasi daerah | 665.480.417 | 0 | 603.610.356 | 603.605.563,00 | 1.207.215.919,00 | 633.790.874 | 1.237.396.437 | 1,86 |

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda

Bappeda Provinsi Maluku melakukan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah. Analisis kinerja pelayanan SKPD Bappeda Provinsi Maluku tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Indikator dan Target Kinerja Bappeda Provinsi Maluku

| NO | INDIKATOR | SPM/ STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|-----|--|-----------------------------|-----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu | | | Ya/Tidak | Ya/Tidak | Ya/Tidak | Ya/Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya/Tidak | Ya/Tidak | |
| 2 | Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD | | | 90% | 95% | 100% | 100% | 91,26% | 72,36 | 97 % | 100% | 100% | |
| 3 | Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,30 | 89 % | 100% | 100% | |
| 4 | Indeks Daya Saing Daerah | | | 0,01-3 | 3,01-4 | 4,01-8 | 8,01-12 | 0,9903 | 0-1,25 | Tidak | 4,01-8 | 8,01-12 | |
| 6 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100 % | 100% | 100% | |
| 7 | Tingkat Efektifitas Kerjasama Pemerintah Daerah | | | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 72,50 | 81,40 | 100 % | 74,2 | 7,42 | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Maluku

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas memerlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar

lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.

Terkait dengan itu, sebagai salah satu lembaga teknis daerah, maka keberadaan BAPPEDA Provinsi Provinsi memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah. BAPPEDA diharapkan mampu berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tidaklah mudah. Hal ini memerlukan suatu telaahan yang mendalam terhadap permasalahan dan penyebab yang menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Di samping itu, perlu upaya yang lebih komprehensif untuk menemukenali dan menentukan alternatif kebijakan yang bagaimana yang harus diambil.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku, dirumuskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah yang belum Holistik, Integratif, Terpadu dan Spasial.
2. Terbatasnya kemampuan teknis aparatur perencana.
3. Belum memadainya sarana prasarana perkantoran pendukung perencanaan.
4. Belum terjaminnya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
5. Belum optimalnya sistem informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
6. Belum optimalnya fungsi kelitbangan dan kerjasama pembangunan daerah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BAPPEDA, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BAPPEDA berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.3.

REVIU RENJA TAHUN 2024 TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | |
|--|------------------------|--|----------------|-----------------------|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| PERENCANAAN | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Provinsi Maluku</i> | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | | <i>16.357.260.778</i> | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Provinsi Maluku</i> | | <i>16.357.260.778</i> |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | Terlaksananya Perencanaan. Peganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | 815.782.012 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | | 815.782.012 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 199.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 199.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 59.526.569 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 59.526.569 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------|-----------------------|---|-----------------|-----------|-----------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 59.526.569 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 59.526.569 |
| Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 26.028.702 | Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 26.028.702 |
| Koordinasi dan Penyusunann Perubahan DPA-SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Laporan | 26.028.702 | Koordinasi dan Penyusunann Perubahan DPA-SKPD | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 26.028.702 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 202.579.203 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Provinsi Maluku | 3 Laporan | 202.579.203 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 243.092.267 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | 12 Bulan | 243.092.267 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | Tersedianya pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 10.089.829.861 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | 12 bulan | 10.089.829.861 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi Maluku | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 9.601.183.572 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi Maluku | 1 laporan | 9.601.183.572 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------|--------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dokumen | 332.368.029 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Provinsi Maluku | 1 laporan | 332.368.029 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 laporan | 98.397.155 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Provinsi Maluku | 1 laporan | 98.397.155 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Provinsi Maluku | jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 1 laporan | 57.881.105 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Provinsi Maluku | 3 laporan | 57.881.105 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian | | 508.977.985 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | 12 bulan | 508.977.985 |
| Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Provinsi Maluku | jumlah pakaian olahraga Perangkat Daerah | 1 paket | 220.500.000 | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Provinsi Maluku | 1 paket | 220.500.000 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Provinsi Maluku | jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 20 orang | 288.477.985 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Provinsi Maluku | 20 orang | 288.477.985 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | Terlaksananya pengadministrasian umum perangkat daerah | | 602.594.043 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | 4 jenis | 602.594.043 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Provinsi Maluku | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 29.756.519 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Provinsi Maluku | 1 paket | 29.756.519 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Provinsi Maluku | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 1 paket | 439.739.590 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Provinsi Maluku | 1 paket | 439.739.590 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Provinsi Maluku | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 paket | 63.640.434 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Provinsi Maluku | 1 paket | 63.640.434 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Provinsi Maluku | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Penyediaan abahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | 34.728.750 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 34.728.750 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Provinsi Maluku | jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 1 laporan | 34.728.750 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Provinsi Maluku | 1 laporan | 34.728.750 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi Maluku | | | 1.709.524.306 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi Maluku | | 1.709.524.306 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Provinsi Maluku | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 7 unit | 577.500.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Provinsi Maluku | 7 unit | 577.500.000 |
| Pengadaan Mebel | Provinsi Maluku | jumlah paket mebel yang disediakan | 4 unit | 555.873.637 | Pengadaan Mebel | Provinsi Maluku | 1 paket | 555.873.637 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Provinsi Maluku | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 3 unit | 576.150.669 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Provinsi Maluku | 3 unit | 576.150.669 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi Maluku | | | 738.530.040 | | Provinsi Maluku | | 738.530.040 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|------------------|----------------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Provinsi Maluku | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 1 laporan | 211.845.375 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Provinsi Maluku | 1 laporan | 211.845.375 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Provinsi Maluku | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 laporan | 526.684.665 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Provinsi Maluku | 1 laporan | 526.684.665 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Provinsi Maluku | | | 1.892.022.531 | Pemeliharaan Barang Milik | Provinsi Maluku | | 1.892.022.531 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Provinsi Maluku | jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 2 unit | 1.120.158.698 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Provinsi Maluku | 2 unit | 1.120.158.698 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Provinsi Maluku | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 1 unit | 198.839.458 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Provinsi Maluku | 1 unit | 198.839.458 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 573.024.375 | | | | 573.024.375 |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | 8.975.723.262 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Provinsi Maluku | | 8.975.723.262 |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Provinsi Maluku | | 1 dokumen | 6.058.548.494 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 6.058.548.494 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan daerah | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan Teknokratik) | 2 Dokumen | 1.302.052.500 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan daerah | Provinsi Maluku | 2 Dokumen | 1.302.052.500 |
| Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Provinsi Maluku | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 Dokumen | 518.017.055 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Provinsi Maluku | 11 Dokumen | 518.017.055 |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik | Provinsi Maluku | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 289.355.106 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Provinsi Maluku | 1 Berita Acara | 289.355.106 |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 289.355.106 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Provinsi Maluku | 1 Berita Acara | 289.355.106 |
| Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Provinsi Maluku | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | 1 Berita Acara | 1.447.018.727 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Provinsi Maluku | 1 Berita Acara | 1.447.018.727 |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | 2.212.750.000 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Provinsi Maluku | 2 Dokumen | 2.212.750.000 |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Provinsi Maluku | Tersedianya data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah | 12 bulan | 654.049.772 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Provinsi Maluku | 12 bulan | 654.049.772 |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Provinsi Maluku | Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi | 84 orang | 654.049.772 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Provinsi Maluku | 84 orang | 654.049.772 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------------------|----------------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Provinsi Maluku | Terlaksananaya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah | 1 laporan | 2.263.124.996 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Provinsi Maluku | 1 laporan | 2.263.124.996 |
| Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Provinsi Maluku | Jumlah kerja sama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya | 1 kerja sama | 269.126.437 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Provinsi Maluku | 1 kerja sama | 269.126.437 |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Provinsi Maluku | jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah | 4 laporan | 1.907.177.299 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Provinsi Maluku | 4 laporan | 1.907.177.299 |
| Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Provinsi Maluku | jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi | 22 dokumen | 86.821.260 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Provinsi Maluku | 22 dokumen | 86.821.260 |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | 9.806.477.216 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Provinsi Maluku | | 9.806.477.216 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Provinsi Maluku | Teraksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | | 3.599.028.492 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Provinsi Maluku | | 3.599.028.492 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 1 Dokumen | 115.762.289 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 115.762.289 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|----------------------|--|------------------------|-----------|----------------------|
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 807.435.941 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 807.435.941 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 269.143.547 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 269.143.547 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 2.406.686.715 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 2.406.686.715 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Provinsi Maluku | | | 3.310.522.717 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Provinsi Maluku | | 3.310.522.717 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Asumsi Makro Ekonomi) | 1 dokumen | 115.762.404 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 115.762.404 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 596.171.212 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 596.171.212 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|----------------------|---|------------------------|-----------|----------------------|
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | 1.177.622.335 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | 2 Dokumen | 1.177.622.335 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang SDA | 1 Laporan | 1.420.966.766 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 1.420.966.766 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Provinsi Maluku | Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahaaan | | 2.896.926.007 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Provinsi Maluku | | 2.896.926.007 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | 1 dokumen | 306.765.656 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 306.765.656 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 2.014.251.898 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 2.014.251.898 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------|-----------------------|---|-----------------|-----------|-----------------------|
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | 1 dokumen | 115.760.273 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 115.760.273 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 460.148.180 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 460.148.180 |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Provinsi Maluku | | | 13.484.863.158 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 13.484.863.158 |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Provinsi Maluku | Jumlah penelitian yang dihasilkan setiap tahun | | 13.484.863.158 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Provinsi Maluku | | 13.484.863.158 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Provinsi Maluku | Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | | 2.811.507.741 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Provinsi Maluku | | 2.811.507.741 |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 1 Laporan | 636.692.664 | | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 636.692.664 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|----------------------|--|------------------------|-----------|----------------------|
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 826.875.000 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 826.875.000 |
| Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketrentaman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketrentaman Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 Laporan | 847.940.077 | Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketrentaman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 847.940.077 |
| Pegelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | 1 dokumen | 500.000.000 | Pegelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 500.000.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Provinsi Maluku | | | 3.429.375.000 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Provinsi Maluku | | 3.429.375.000 |
| Penelitian Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 dokumen | 771.750.000 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 771.750.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 1 dokumen | 750.000.000 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 750.000.000 |
| Penelitian Pengembangan Pariwisata | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 1 dokumen | 882.000.000 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 882.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------|----------------------|---|------------------------|-----------|----------------------|
| Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 1 dokumen | 750.000.000 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 750.000.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 1 dokumen | 275.625.000 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Provinsi Maluku | 1 laporan | 275.625.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Provinsi Maluku | | | 5.556.750.000 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Provinsi Maluku | | 5.556.750.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 dokumen | 771.750.000 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 771.750.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 1 dokumen | 1.785.000.000 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 1.785.000.000 |
| Penelitian Dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 dokumen | 750.000.000 | Penelitian Dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 750.000.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 1 dokumen | 750.000.000 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 750.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|----------------------|--|------------------------|-----------|----------------------|
| Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 1 dokumen | 750.000.000 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 750.000.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | 1 dokumen | 750.000.000 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 750.000.000 |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Provinsi Maluku | | | 1.687.230.417 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Provinsi Maluku | | 1.687.230.417 |
| Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Provinsi Maluku | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 dokumen | 771.750.000 | Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 771.750.000 |
| Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Inovatif | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan | 665.480.417 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 665.480.417 |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Provinsi Maluku | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 1 Laporan | 250.000.000 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 250.000.000 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah, selain di dasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disandingkan dengan sasaran kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Maluku merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan diselaraskan dengan tugas fungsi Bappeda Provinsi Maluku. Tujuan sasaran Bappeda Provinsi Maluku dapat di Lihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.1 :

Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Maluku tahun 2019-2024

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke- | | |
|----|---|---|---|---|------------------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Bappeda | Baik (B / 60-70) | Baik (B / 60-70) | Baik (B / 60-70) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terukur | 2. Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Sasaran Daerah | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|----------|----------|
| | | | 3. Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 4. Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu | Ya/Tidak | Ya/Tidak | Ya/Tidak |
| | | | 5. Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 6. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke Dalam APBD | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 7. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 8. Indeks Inovasi Daerah | Inovatif | Inovatif | Inovatif |

3.2. Program dan Kegiatan

Pencapaian Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilakukan dengan pendekatan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Usulan Renja Bappeda Provinsi Maluku untuk tahun 2024 yaitu Program : 4, Kegiatan 17 dan Sub Kegiatan 66. Penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan ditampilkan pada Bab IV.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Maluku

Berdasarkan dokumen RPJMD Maluku 2019 - 2024, visi Kepala Daerah (KDH) adalah: “*Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan*”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui penetapan Tema RKPD provinsi Maluku tahun 2024 yaitu “ ***Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas*** ”. Tema RKPD akan dijawab dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 yaitu :

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing Secara Berkelanjutan
3. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
4. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
5. Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul
6. Pemantapan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mutu Layanan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1: Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Serta Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.5.05

| KODE | | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|----|----|------|----|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | target Capaian kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| 5 | 01 | | | | Perencanaan | | | 48.574.428.330 | | | | |
| 5 | 01 | | | | Perencanaan | | | 35.133.665.172 | | | | 34.704.253.788 |
| 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Perangkat Daerah | <i>Provinsi Maluku</i> | | 16.351.446.838 | | | 14.982.924.538 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 815.782.012,00 | | | 12 bulan | 856.571.113 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 199.000.000 | | 1 Dokumen | 208.950.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------------|-----------|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 59.526.569 | | 1 Dokumen | 62.502.897 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 59.526.569 | | 1 Dokumen | 62.502.897 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 26.028.702 | | 1 Dokumen | 27.330.137 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 26.028.702 | | 1 Dokumen | 27.330.137 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 202.579.203 | | 1 Laporan | 212.708.163 |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Maluku | 4 Laporan | 243.092.267 | | 4 Laporan | 255.246.880 |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 10.089.829.861 | | | 9.241.427.305 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------------|----------------|--------------------|--|----------------|--------------------|
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi Maluku | 68 orang/bulan | 9.601.183.572 | | 68 orang/bulan | 8.728.348.702 |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 332.368.029 | | 1 Dokumen | 348.986.430 |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 98.397.155 | | 1 Laporan | 103.317.013 |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Provinsi Maluku | 3 Laporan | 57.881.105 | | 3 Laporan | 60.775.160 |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 508.977.985 | | | 523.401.884 |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Provinsi Maluku | 1 Paket | 220.500.000 | | 1 Paket | 220.500.000 |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menikuti Pendidikan dan Pelatihan | Provinsi Maluku | 20 orang | 288.477.985 | | 20 orang | 302.901.884 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 596.780.103 | | | 626.619.108 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|-----------------|-----------|----------------------|--|-----------|----------------------|
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Provinsi Maluku | 1 Paket | 29.756.519 | | 1 Paket | 31.244.345 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Provinsi Maluku | 1 Paket | 439.739.590 | | 1 Paket | 461.726.570 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Provinsi Maluku | 1 Paket | 63.640.434 | | 1 Paket | 66.822.456 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahann Bacaan dan Peraturan Pparundang-Undangan yang Disediakan | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 34.728.750 | | 1 Dokumen | 36.465.188 |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 28.914.810 | | 1 Laporan | 30.360.551 |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.709.524.306 | | | 1.795.000.521 |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 01 | Pengadaan Kendaran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Provinsi Maluku | 8 Unit | 577.500.000 | | 8 Unit | 606.375.000 |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Provinsi Maluku | 1 Paket | 555.873.637 | | 1 Paket | 583.667.319 |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Provinsi Maluku | 30 Unit | 576.150.669 | | 30 Unit | 604.958.202 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-----------------|-----------|----------------------|--|-----------|----------------------|
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 738.530.040 | | | 775.456.542 |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 211.845.375 | | 1 Laporan | 222.437.644 |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Provinsi Maluku | 1 Laporan | 526.684.665 | | 1 Laporan | 553.018.898 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.892.022.531 | | | 1.384.948.064 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Parizinan | Provinsi Maluku | 46 Unit | 1.120.158.698 | | 46 Unit | 1.176.166.633 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Provinsi Maluku | 124 Unit | 198.839.458 | | 124 Unit | 208.781.431 |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Ruangan Kantor yang Direhabilitasi | Provinsi Maluku | 4 Ruang | 573.024.375 | | 4 Ruang | 573.024.375 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------|----------------------|
| 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Provinsi Maluku | | 8.975.741.118 | | | 9.424.528.174 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | 6.058.566.350 | | | 6.361.494.668 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan daerah | Jumlah dokumen rancangan awal RKPD | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 1.302.052.500 | | 1 dokumen | 1.367.155.125 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Dokumen | 518.017.055 | | 1 Dokumen | 543.917.908 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah berita acara konsultasi publik | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Berita Acara | 289.355.106 | | 1 Berita Acara | 303.822.861 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Berita Acara | 289.372.962 | | 1 Berita Acara | 303.841.610 |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Provinces | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Berita Acara | 1.447.018.727 | | 1 Berita Acara | 1.519.369.663 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---------------------------------|--------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 06 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD) | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 3 dokumen | 2.212.750.000 | | 3 dokumen | 2.323.387.500 |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 654.049.772 | | | 686.752.261 |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 100 orang | 654.049.772 | | 100 orang | 686.752.261 |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 2.263.124.996 | | | 2.376.281.246 |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 02 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Jumlah Kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 2 Kerja Sama | 269.126.437 | | 2 Kerja Sama | 282.582.759 |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 5 Laporan | 1.907.177.299 | | 5 Laporan | 2.002.536.164 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|--|---|---------------------------------|------------|----------------------|--|------------|-----------------------|
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 04 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 22 Dokumen | 86.821.260 | | 22 Dokumen | 91.162.323 |
| 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 9.690.714.812 | | | 10.175.250.553 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | 3.599.028.492 | | | 3.778.979.917 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Dokumen | 115.762.289 | | 1 Dokumen | 121.550.403 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renja dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 807.435.941 | | 1 Laporan | 847.807.738 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------|----------------------|
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah biddang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Dokumen | 269.143.547 | | 1 Dokumen | 282.600.724 |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 2.406.686.715 | | 1 Laporan | 2.527.021.051 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | 3.194.760.313 | | | 3.354.498.329 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | 1 Dokumen | 115.762.404 | | 1 Dokumen | 121.550.524 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 596.171.212 | | 1 Laporan | 625.979.773 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------|----------------------|
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Dokumen | 1.177.622.335 | | 1 Dokumen | 1.236.503.452 |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 1.420.966.766 | | 1 Laporan | 1.492.015.104 |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 2.896.926.007 | | | 3.041.772.307 |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 306.765.656 | | 1 dokumen | 322.103.939 |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 2.014.251.898 | | 1 Laporan | 2.114.964.493 |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Provinsi Maluku | 1 dokumen | 115.760.273 | | 1 dokumen | 121.548.287 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|---|---------------------------------|-----------|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 460.148.180 | | 1 Laporan | 483.155.589 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | Provinsi Maluku | | 13.440.763.158 | | | 3.928.813.701 |
| 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | Provinsi Maluku | | 13.440.763.158 | | | 3.928.813.701 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | 2.811.507.741 | | | 2.041.467.374 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 636.692.664 | | 1 Laporan | 668.527.297 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 04 | Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 826.875.000 | | 1 Laporan | 826.875.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------------|----------------------|
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | | Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketrentaman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi. Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 847.940.077 | | 1 Laporan | 847.940.077 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 01 | Pegelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah dokumen data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Dokumen | 500.000.000 | | 1 Dokumen | 525.000.000 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | 3.429.375.000 | | 12 bulan | 3.563.343.750 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 10 | Penelitian Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Aspek-aspek sosial | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Dokumen | 771.750.000 | | 1 Dokumen | 810.337.500 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah dookumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Dokumen | 750.000.000 | | 1 Dokumen | 750.000.000 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 04 | Penelitian Pengembangan Pariwisata | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 882.000.000 | | 1 dokumen | 926.100.000 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kesehatan | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 750.000.000 | | 1 dokumen | 787.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|---------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------|----------------------|
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 275.625.000 | | 1 dokumen | 289.406.250 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | 5.556.750.000 | | | 5.834.587.500 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 771.750.000 | | 1 dokumen | 810.337.500 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 1.785.000.000 | | 1 dokumen | 1.874.250.000 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 06 | Penelitian Dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 750.000.000 | | 1 dokumen | 787.500.000 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 750.000.000 | | 1 dokumen | 787.500.000 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 750.000.000 | | 1 dokumen | 787.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|---------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------|----------------------|
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 750.000.000 | | 1 dokumen | 787.500.000 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | 1.643.130.417 | | | 1.725.286.938 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 01 | Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 dokumen | 727.650.000 | | 1 dokumen | 764.032.500 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Disemasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 665.480.417 | | 1 Laporan | 698.754.438 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi | Provinsi Maluku dan Luar Daerah | 1 Laporan | 250.000.000 | | 1 Laporan | 262.500.000 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Maluku “*Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan*”. Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Rancangan Renja sebagai pedoman bagi Bappeda Provinsi Maluku di dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1 Catatan Penting.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku serta peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan:

- a) Bappeda Provinsi Maluku berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024.
- b) Bappeda Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024.
- c) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Maluku. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber

pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Ambon, Maret 2023

Kepala Bappeda Provinsi Maluku

Dr. Anton A. Lailosa, ST. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700208 199803 1 010